

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	SUARA KARUA	8	06-08-2002

Pengambilalihan CPP Block Diharapkan Mulus

Meski tanggal berakhirnya kontrak PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), 8 Agustus 2002, sudah semakin dekat, namun masalah pengambilalihan ladang minyak Coastal Plains Pekanbaru (CPP) Block oleh Riau semakin rumit saja. Sejumlah pihak di Riau saling "sikut menyikut" dan "cakar-cakaran" dalam hal CPP Block tersebut.

Bahkan akhir-akhir ini timbul isu CPP Block bakal ditunda penyerahannya. Penundaan ini dikabarkan atas permintaan Gubernur Riau Saleh Djasit sendiri kepada pemerintah pusat, karena mereka Pemkab Siak ingin mendominasi pengelolaan ladang minyak tersebut. Padahal perjuangan untuk mendapatkan CPP Block tidak hanya Siak saja yang melakukan, melainkan seluruh komponen masyarakat Riau.

Sikap Gubernur Riau yang meminta agar penyerahan CPP Block itu ditunda mendapatkan protes dari berbagai pihak. Misalnya saja seorang tokoh masyarakat Riau yang mengaku dirinya sebagai Presiden Riau Merdeka, Al Azhar mengatakan permintaan itu sebagai hal yang tak bagus. Sebab, masyarakat Riau akan kecewa dengan apa yang telah diperjuangkan selama ini.

"Saya menilai kalau sampai ditangguhkan maka hal itu sebagai perbuatan yang merugikan.

Masyarakat akan malu dengan apa yang telah diperjuangkan selama ini," katanya. Bukan itu saja, Al Azhar menambahkan masalah yang diperdebatkan itu hanya intern daerah. Seperti halnya pembentukan Provinsi Kepri (Kepulauan Riau) yang harus dikembalikan ke daerah. Masalah CPP Block juga harus diselesaikan di daerah bukan di kembalikan lagi ke pusat.

"Paling penting itu transparansi semua pihak, masalah ini pasti bisa diselesaikan. Dengan cara mendudukan semua pihak baik provinsi maupun kabupaten. Bukan lantas menyerahkan lagi pada pusat," tambahnya. Bila dengan duduk semeja tidak tuntas juga, ia menegaskan CPP Block tidak boleh kembali ke pusat. Tapi jalan terakhir yang harus dilakukan adalah dengan menutup saja ladang minyak tersebut.

Tak Akan Terwujud

Seandainya memang benar gubernur mengirimkan surat penundaan, maka yang dipermalukan Riau bukan pusat. Namun yang dipermalukan itu kita sendiri yang selama ini berjuang. "Kita sudah lama berjuang sampai pernah terjadi siaga satu akan tetapi kan ini kita dipermalukan oleh kita sendiri," kata Al Azhar.

Pada sisi lain juga kepercayaan pusat terhadap

Riau tidak akan pernah terwujud lagi. Sebab CPP Block yang terkecil saja sudah terjadi cakar-cakaran sementara Rokan Block yang besar itu lebih penting lagi. "Pusat tidak akan menoleh lagi soal Rokan Block karena CPP saja sudah jadi permasalahan," tuturnya.

Sementara itu di tempat terpisah, salah seorang anggota Tim CPP Block Kabupaten Siak, H Ramlan Comel SH mengatakan pengambilalihan pengelolaan Blok CPP dari Caltex kepada konsorsium Pertamina dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) pasca 8 Agustus 2002 mendatang tetap akan dilaksanakan, dan tidak akan ditangguhkan.

Bahkan, menurut dia, saat ini Direktur PT BSP HM Azaly Djohan beserta Direksi PT BSP lainnya dan Direksi Pertamina Hulu yang diketuai oleh Heru Cokro baru saja mengadakan pertemuan dengan Dirjen Migas Rahmat Subikyo.

Agenda pertemuan itu adalah persiapan penandatanganan *Production Sharing Contract (PSC)* antara PT BSP dan Pertamina dengan Pemerintah Pusat. Dirjen Migas juga menyampaikan, bahwa tidak akan ada penundaan pengambilalihan pengelolaan itu. "Pemerintah, BUMN (Pertamina) dan BUMD Kabupaten Siak (PT BSP) sudah komit, jadi tidak ada kendala lagi," kata Dirjen Migas seperti dikutip Ramlan Comel.

Dirjen juga mengatakan, jika hal-hal seperti pembagian antara provinsi dan Kabupaten Siak di PT BSP belum selesai, itu bukan urusan pemerintah pusat melainkan urusan intern di daerah. "Masalah internal tidak akan mempengaruhi apakah masa kontrak pengelolaan Blok CPP itu akan diperpanjang," papar Dirjen Migas dalam pertemuan tersebut dan meminta pernyataannya itu diekspos.

Jangan Menuding

Sedangkan Direksi PT BSP sendiri menyanggah dugaan terhadap Pertamina yang akan mendominasi kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan tersebut. Ramlan Comel menjelaskan, konsorsium yang akan mengelola Blok CPP tersebut adalah PT BSP yang merupakan BUMD Kabupaten Siak, dan Pertamina yang merupakan BUMN.

"Semua hak dan kewajiban antara PT BSP dan Pertamina adalah sama. Kebijakan yang akan dibuat juga atas kebijakan bersama. Bahkan dalam operasinya juga dilakukan bersama, yang disebut Badan Operasi Bersama (BOB). Untuk struktur organisasinya juga akan sama banyak. Jadi jangan kita menuding yang bukan-bukan, kalau itu akan mengeruhkan suasana," papar Ramlan yang kini ditunjuk menduduki jabatan Direktur Muda PT BSP itu.

Menyinggung masalah persiapan pengambil-

alihan itu. Dirut PT BSP itu mengatakan, untuk persiapan tidak ada masalah lagi dan sudah dilakukan dengan maksimal. Karena bukan PT BSP saja yang akan mengelola, melainkan konsorsium yang terdiri dari Pertamina dan PT BSP. Sedangkan untuk perekrutan tenaga kerja tetap dilakukan PT BSP, contohnya PT BSP sudah melatih sebanyak 70 orang tenaga lokal yang akan ditempatkan sebagai tenaga *security*. Mereka dilatih oleh kepolisian setempat. Dan PT BSP beberapa hari lalu juga sudah membuka lowongan kerja, dimana nanti akan diseleksi dan jika diterima akan ditempatkan pada BOB.

Selain itu, saat ini PT CPI secara bertahap sudah mulai mengurangi tenaga kerjanya yang berada di wilayah Blok CPP. "Yang jelas konsorsium dan pemerintah tidak ada masalah, semuanya sudah komit. Sedangkan permasalahan internal daerah akan diselesaikan di daerah, bukan berarti ditangguhkan," tandasnya.

Benarkah daerah sudah siap mengambil alih ladang minyak yang kini berproduksi sekitar 55 ribu barel minyak per hari tersebut pada tanggal 8 Agustus mendatang? Nanti akan terbukti juga, setelah PT CPI sudah meninggalkan CPP Block, dan pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada daerah dan Pertamina. (Adrizas)